

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN
PADAHERANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2015**

EMI YULIA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan memiliki pemikiran tidak akan merubah taraf hidup mereka menjadi lebih baik, ketidaktahuan masyarakat terhadap politik sehingga masyarakat yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya dengan alasan adanya janji program dari kandidat yang meyakinkan masyarakat dan dianggap bisa teralisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 ?, 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 ?, 3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015?.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 30 orang terdiri dari 1 orang KPU, 3 orang PPK, 114 orang PPS, 1 orang PanWas Kecamatan, 3 orang tim sukses, 2 orang tokoh masyarakat, dan 6 orang masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015, partisipasi masyarakat cukup baik. Faktor yang mempengaruhi masyarakat berpartisipasi yaitu Pilkada Kabupaten Pangandaran merupakan Pilkada pertama, masyarakat tertarik dengan program yang disampaikan calon kandidat, calon dianggap mempunyai pengalaman karena pernah jadi ketua DPRD Kabupaten Ciamis. Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya informasi tentang sosialisasi pelaksanaan Pilkada, masyarakat dalam memberikan hak suaranya mudah tergiur dengan adanya praktik money politik. Upaya yang dilakukan berupa sosialisasi kembali kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada, pemahaman kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat agar tidak terhasut oleh adanya praktik money politik sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan.

Kata Kunci: *Partisipasi, Politik Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah Kabuapetn Pangandaran*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme demokrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi. Mekanisme terhadap penyerahan kedaulatan rakyat ini, akan dilakukan melalui wakilnya (*representative democracy*) adalah melalui pemilu. bagian dari agenda pemilu di Indonesia.

Kabupaten Pangandaran telah melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati perdana pada tahun 2015 yang di menangkan oleh pasangan H. Jeje Wiradinata dan H.Adang Hadari dengan perolehan suara 140.481 jiwa dari jumlah total suara 242.532 jiwa dengan hasil persentase 58,66 %. Kemenangan tersebut tidak luput dari partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Pangandaran khususnya di Kecamatan Padaherang. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu faktor penting atas terpilihnya salah satu pasangan calon menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran periode 2015-2020.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang, “pemilih adalah penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan”.

Berdasarkan data di KPU Kabupaten Pangandaran diketahui bahwa jumlah data pemilih Pilkada Kabupaten Pangandaran adalah sebanyak 52.373 pemilih. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 25.828 pemilih dan jumlah perempuan sebanyak 26.545 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran di Kecamatan Padaherang diketahui sebanyak 37.033 pemilih dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yaitu 15.340 pemilih.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah belum maksimal. Hal tersebut diketahui dari beberapa indikator yang memperlihatkan adanya gejala tersebut antara lain :

1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap politik sehingga masyarakat yang memiliki hak pilih.
2. Masyarakat yang memiliki hak pilih, tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan memiliki pemikiran tidak akan merubah taraf hidup mereka menjadi lebih baik.
3. Masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan merasa kurang yakin

terhadap visi dan misi yang dijanjikan oleh para calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode purposive sampling, sebagaimana pendapat Sugiyono (2012:85) purposive sampling adalah:“teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Dengan menggunakan metode ini diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan diharapkan mampu menjangkau realita di lapangan dengan cara observasi, dan wawancara.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui jawaban dari wawancara dan data sekunder dari buku atau dokumen pendukung. Sumber data yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPU Kabupaten Pangandaran 1 orang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 3 orang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) 14 orang, Panwas Kecamatan Padaherang 1 orang, tim sukses 3 orang, tokoh masyarakat 2 orang, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya 3 orang, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya 3 orang, dengan demikian jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 30 orang.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur.
2. Studi Lapangan yaitu diperoleh dengan melakukan penelitian pada informan yang dijadikan sumber data. Studi ini dilakukan dengan cara :
 - a. Observasi
Melakukan pengamatan secara langsung mengenai partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran
 - b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada KPU Kabupaten Pangandaran, PPK, PPS Panwas Kecamatan Padaherang, tim sukses, tokoh masyarakat, dan masyarakat di Kecamatan Padaherang.

c. Dokumentasi

C. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Partisipasi

Menurut Rahardiansyah (2010 : 285-286) 'partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik'.

Menurut Efriza (2012 : 152) bahwa :

Partisipasi juga dimengerti sebagai berperan serta atau ikut serta yang selama ini dipahami masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan publik, baik yang memiliki dimensi politik maupun non-politik, dapat terselenggara dengan baik

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan serangkaian kegiatan mengambil bagian atau secara keseluruhan dalam sebuah kegiatan yang berbentuk kerjasama baik secara individu maupun kelompok.

2. Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Sitopu (2012 : 92) adalah sebagai berikut :

Partisipasi politik adalah : suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait

dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi.

Menurut Huntington dan Nelson (*No Easy Choice : Political Participation in Developing Countries* : 3) :

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah kegiatan sukarela warga masyarakat yang turut serta dalam kehidupan politik baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan umum.

3. Fungsi Partisipasi Politik

Menurut Sanit (Sahid, 2011 : 184) memandang ada tiga fungsi partisipasi yaitu :

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.
2. Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.
3. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem

politik, misalnya melalui pemogokan, huru-hara dan kudeta.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan, fungsi partisipasi politik diarahkan dalam kegiatan pemilihan baik berupa dukungan maupun tuntutan kepada pemerintah sebagai upaya kontrol/pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Partisipasi politik menurut Sastroatmodjo (Sahid, 2011 : 184) memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk mendorong program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah.
2. Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
3. Sebagai sarana untuk membuktikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Fungsi partisipasi politik terutama dalam pembangunan suatu bangsa dan negara tidak terlepas dari bagaimana masyarakat memandang pentingnya efek atau dampak dari kegiatan politik yang dilakukan oleh pemerintah.

4. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Surbakti (1992 : 115) menyebutkan dua variable penting yang memengaruhi tinggi-rendahnya

tingkat partisipasi politik seseorang yaitu :

Pertama, aspek kesadaran seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hal dan kewajiban sebagai warga Negara. *Kedua*, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa tinggi atau rendahnya partisipasi politik seseorang dipengaruhi oleh faktor lain seperti status sosial dan ekonomi, yang dimaksud dengan status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan.

Menurut Rush dan Althof (2003:159) tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang diukur melalui tingkatan intensitas individu tersebut dalam kegiatan politik. Rush dan Althof menyatakan terdapat Sembilan tingkatan dalam tindakan partisipasi politik yang dilakukan oleh seseorang yaitu :

1. *Votting* (pemberian suara dalam pemilu). Merupakan tingkat partisipasi paling rendah karena hanya dilakukan secara periodic, tidak rutin.
2. Keikutsertaan dalam suatu diskusi politik.
3. Keikutsertaan dalam kampanye politik, rapat umum, demonstrasi, dsb.
4. Tercatat sebagai anggota biasa dalam suatu Ormas/LSM yang bernuansa politik (*quasi-political*).

5. Tercatat sebagai pengurus aktif dalam suatu Ormas/LSM yang bernuansa politik (*quasi-political*).
6. Menjadi anggota biasa dalam sebuah parpol.
7. Menjadi pengurus aktif dalam sebuah parpol.
8. Secara professional bekerja sebagai pencari jabatan politik atau jabatan administratif.
9. Secara professional, menduduki jabatan politik di pemerintahan atau jabatan administratif.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan partisipasi politik seseorang diukur melalui tingkatan intensitas individu tersebut dalam kegiatan politik.

5. Bentuk Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson (Cholisin dan Nasiwan, 2012 : 152) membagi partisipasi politik dalam dua kategori, yaitu :

1. Partisipasi otonom, yaitu partisipasi politik yang didorong oleh keinginan pelakunya sendiri untuk melakukan tindakan tersebut.
2. Partisipasi mobilisasi, yaitu partisipasi politik yang digerakkan atau diinginkan oleh orang lain, bukan karena kesadaran atau keinginan pelakunya sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan, dalam kegiatan partisipasi politik diarahkan pada mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah, baik dilakukannya bersifat individu maupun kelompok baik secara otonom atau

keinginan individu maupun dimobilisasi atau melalui komando/ajakan pimpinan ataupun orang lain dalam organisasi.

Surbakti (Gatara dan Said, 2007 :98) dari sisi tipologi, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi:

1. Partisipasi aktif, yaitu mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah.
2. Partisipasi pasif, berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan, partisipasi politik merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kolektif baik secara aktif maupun pasif. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun mendukung setiap kebijakan pemerintah yang ditetapkan.

6. Sifat Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson (Arifin, 2012:213) mengemukakan bahwa sifat partisipasi ada dua yaitu bersifat otonom (*autonomous particiation*) dan partisipasi yang dimobilisasi atau digerakan (*mobilized participation*).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015

Closky (Arifin, 2011: 210-211) mengemukakan bahwa :

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (*public policy*). Kegiatan itu mencakup tindakan politik seperti :

1. Memberikan suara dalam pemilihan umum.
2. Menghadiri kampanye.
3. Mengadakan lobi dengan politikus atau pemerintah.

Untuk memperjelas tentang partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015, pembahasan hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Memberikan Suara dalam Pemilihan Umum

Memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan salah satu kegiatan dalam partisipasi politik untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiardjo (2008 : 367) bahwa :

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik.

Kegiatan ini mencakup tindakan sebagai berikut :

1. Tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum.
2. Menghadiri rapat umum.
3. Mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.
4. Menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya.

Faktor yang memengaruhi masyarakat di Kecamatan Padaherang untuk ikut berpartisipasi dan memberikan hak suaranya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dipengaruhi oleh berbagai faktor pertama yaitu merupakan Pilkada pertama, kedua adanya janji atau program dari kandidat yang meyakinkan masyarakat dan dianggap bisa teralisasi. Ketiga Masyarakat merasa calon punya pengalaman karena pernah jadi ketua DPRD Kabupaten Ciamis.

Akibat dari adanya *money politik* masyarakat mudah terhasut untuk memilih calon kandidat berdasarkan berapa besar jumlah uang yang mereka terima. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat di Kecamatan Padaherang kurang memiliki pemahaman dan kurang melakukan penilaian atas berbagai keunggulan dari para calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga dalam pelaksanaan pemilihan masyarakat merasa kurang secara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya.

Masyarakat di Kecamatan Padaherang menganggap bahwa memilih dalam Pilkada itu merupakan hak bukan kewajiban. Karena tidak ada tuntutan bagi masyarakat untuk mengikuti kegiatan pemilihan dan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, maka dalam hal ini masih ditemukan ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik.

2. Menghadiri Kampanye

Irawan (Efriza, 2012 : 178) mengemukakan bahwa :

Kampanye adalah kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain agar orang atau kelompok lain tersebut mengikuti kegiatan politik.

Dalam kegiatan kampanye, tim sukses di Kecamatan Padaherang mengajak dan menghimbau masyarakat untuk mau mendengarkan visi dan misi program dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga masyarakat dapat tertarik dengan program dari kandidat yang diusungnya dan masyarakat dapat memberikan hak suaranya.

Dalam kegiatan kampanye masyarakat dirasa kurang memahami program dari pihak kandidat. Hal itu dapat terlihat dari bahwa masyarakat memilih pasangan calon bukan melihat program tetapi karena adanya *money politik* yang dilakukan. Kegiatan kampanye dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati diberikan waktu untuk berkampanye menyampaikan visi dan misi program dari masing-masing kandidat baik secara terbuka maupun secara tertutup sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Masyarakat menyatakan tidak ada paksaan baik dari kandidat ataupun dari tim sukses untuk menghadiri kampanye. Untuk menghadiri kampanye masyarakat tidak diharuskan. Masyarakat secara sukarela dalam mengikuti kegiatan kampanye.

3. Mengadakan Lobi dengan Politikus atau Pemerintah

Huntington dan Nelson (Efriza, 2012 : 173) bahwa :

Kegiatan *Lobbying* yaitu kegiatan mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

Dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 masyarakat tentunya ingin mengenal sosok atau figur yang akan jadi pemimpin di daerah tempat tinggalnya. Masyarakat ada yang melakukan kunjungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati baik secara perorangan atau kelompok begitupun sebaliknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk menyampaikan visi

dan misi guna mencari dukungan masyarakat.

Masyarakat di Kecamatan Padaherang kurang memperoleh informasi yang jelas tentang kemampuan yang dimiliki oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Masyarakat kurang memiliki dan kurang mengetahui dengan jelas apa saja keunggulan dan kemampuan yang dimiliki oleh pasangan calon.

Untuk menjalin komunikasi yang baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, penyelenggara kegiatan pemilihan secara terbuka menerima saran dan masukan dari masyarakat, saran dan masukan masyarakat dijadikan bahan evaluasi oleh penyelenggara untuk dimasa yang akan datang.

2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam pemilihan kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 yaitu, masyarakat kurang mendapatkan informasi sehingga tidak semua masyarakat mengetahui adanya

kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Selain itu, anggapan masyarakat di Kecamatan Padaherang yang menganggap bahwa memilih dalam Pilkada merupakan hak bukan kewajiban jadi masih ditemukan adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Kemudian kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi masih kurang. Masih ada masyarakat yang tidak hadir, tidak datang ke TPS untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2015.

Hambatan lainnya tim sukses kesulitan untuk mengumpulkan masa sebanyak-banyaknya untuk dapat mendengarkan visi misi program dari calon kandidat yang diusungnya.

Dalam kegiatan lobi dengan politikus atau pejabat pemerintah yaitu dalam hal kunjungan yang dilakukan masyarakat ke pasangan calon maupun dari pasangan calon ke masyarakat hambatannya yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pasangan calon sehingga tidak bisa bertemu secara langsung.

Dalam melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik atau pejabat pemerintah, masyarakat di Kecamatan Padaherang kurang melakukan komunikasi dengan para tokoh politik atau pejabat pemerintah. Hal itu terlihat dari jarangya masyarakat yang melakukan kunjungan ke rumah para tokoh politik atau pejabat pemerintah

untuk melakukan komunikasi terkait pemilihan umum kepala daerah. Kemudian ketidaktahuan masyarakat untuk memperoleh narasumber yang tepat sehingga masyarakat kurang memperoleh informasi yang jelas tentang kemampuan yang dimiliki oleh pasangan calon yang akhirnya masyarakat mudah terpengaruh oleh situasi politik kurang sehat.

3. Upaya-Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan yang dihadapi dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015

Dari hasil penelitian telah dilakukan upaya dalam kegiatan sosialisasi dengan melakukan sosialisasi yang lebih ditingkatkan lagi, menyebarkan informasi lebih luas melalui media-media informasi sehingga masyarakat walaupun tidak mengikuti kegiatan sosialisasi tetapi mengetahui pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran. Dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu sosialisasi kembali, menginformasikan kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat yang belum terdaftar di DPT dapat menggunakan KTP dan surat keterangan sehingga dapat memberikan hak suaranya dan dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Kemudian masyarakat diberikan pemahaman agar jangan

mudah terpengaruh dengan adanya praktek *money politik*.

Tim sukses mengajak dan meyakinkan masyarakat secara berulang-ulang serta mengumpulkan masyarakat sebanyak-banyaknya untuk dapat menghadiri kampanye, meskipun tidak ada surat resmi bagi masyarakat untuk menghadiri kampanye.

Dalam kegiatan lobi dengan politikus atau pejabat pemerintah telah dilakukan upaya dalam kunjungan yang dilakukan masyarakat ke pasangan calon maupun dari pasangan calon ke masyarakat yaitu dengan membuat janji terlebih dahulu sebelum melakukan kunjungan kepada pasangan calon dengan menyampaikan maksud dan tujuannya.

Upaya yang telah dilakukan dalam melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik atau pejabat pemerintah masyarakat di Kecamatan Padaherang yaitu dengan dengan melakukan pendekatan-pendekatan antara masyarakat dengan para tokoh politik atau pejabat pemerintah untuk melakukan komunikasi terkait pemilihan umum kepala daerah dan para tokoh politik atau pejabat pemerintah juga memberikan informasi yang jelas mengenai visi dan misi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal ini juga masyarakat telah diberikan pemahaman agar masyarakat lebih jeli dalam memilih narasumber yang tepat sehingga masyarakat dapat menggali informasi dan memperoleh informasi yang jelas.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 dapat dikategorikan cukup baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pertama karena Pilkada Kabupaten Pangandaran merupakan Pilkada pertama sehingga masyarakat antusias berpartisipasi dalam memilih pemimpin untuk daerah tempat tinggalnya. Kedua masyarakat tertarik dengan program yang disampaikan calon kandidat yang dianggap dapat membawa perubahan dimasa yang akan datang. Ketiga masyarakat merasa calon punya pengalaman karena pernah jadi Ketua DPRD Kabupaten Ciamis.
2. Hambatan dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pangandaran yaitu : kurangnya informasi tentang sosialisasi pelaksanaan Pilkada, masyarakat dalam memberikan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mudah tergiur terpengaruh dengan adanya *money politik*.

3. Upaya mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan upaya sebagai berikut : penyelenggara menyebarkan informasi lebih luas melalui media-media informasi sehingga masyarakat walaupun tidak mengikuti kegiatan sosialisasi tetapi mengetahui pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran, masyarakat diberikan pemahaman agar jangan mudah terpengaruh dengan adanya praktek *money politik* sehingga dalam memberikan hak suaranya masyarakat dapat melihat berdasarkan keunggulan, berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh paslon dan dalam pelaksanaan pemilu masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Panitia penyelenggara sebaiknya melakukan sosialisasi tidak berdekatan dengan pelaksanaan waktu Pilkada. Akan tetapi melakukan sosialisasi jauh-jauh hari secara terprogram sebelum Pilkada itu diselenggarakan agar masyarakat dapat mengetahui dan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya.
2. Panitia penyelenggara atau pemerintah setempat juga sebaiknya memberikan

- pemahaman mengenai pengetahuan politik kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat agar tidak terhasut oleh adanya praktik *money politik*, sehingga masyarakat diharapkan dapat melakukan penilaian berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh pasangan calon agar masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan.
3. Panitia penyelenggara dan pemerintah setempat lebih berupaya lagi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

a. Daftar Buku-Buku

- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin dan Nasiwan. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Efriza, 2012. *Political Explore*. Bandung : Alfabeta.
- Gatara, Sahid dan Said, Dzulkiah. 2007. *Sosiologi Politik*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan M. 1997. *No Easy Choice : Political Participation in Developing Countries*. Cambridge, Mass : Harvard University Press.

- Rahardiansyah P, Trubus. 2010. *Pengantar Ilmu Politik Paradigma, Konsep Dasar dan Relevansinya untuk Ilmu Hukum*. Jakarta : Universitas Trisakti.
- Rush, Michael dan Althoff, Phillip. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sahid, Komarudin. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sitopu, P. Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasirindo.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

b. Dokumen-Dokumen

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.